

Transformasi Kabupaten Banyuwangi dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Inovasi Kebijakan

The Transformation of Banyuwangi Regency in Sustainable Development: A Policy Innovation Perspective

Yuswarni^{1*}, Denok Kurniasih²

¹ Student of Public Administration Doctoral Programme, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

¹ Lecturer of Public Administration, FISIP, Universitas Nasional Jakarta, Indonesia

² Lecturer of Public Administration Doctoral Programme, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman Indonesia

*Correspondence Author: yuswarni@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Pada penelitian ini membahas tentang Transformasi kabupaten Banyuwangi dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Inovasi Kebijakan yang bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana transformasi inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah ini dan dalam penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi studi pustaka, di mana data diambil dari berbagai sumber sekunder, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, dan data statistik setempat. Maka dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup warga melalui program ekowisata, digitalisasi layanan publik (Smart Kampung), pemberdayaan UMKM, serta penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Selain itu, program anggaran partisipatif juga memperkuat akuntabilitas pemerintah setempat. Diskusi dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana inovasi dalam kebijakan yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan politik dapat menciptakan dampak signifikan yang dapat diterapkan di daerah lain.

Kata kunci: Transformasi digital; pembangunan berkelanjutan; Inovasi Kebijakan

Abstract

This article analyzes the transformation of Banyuwangi Regency in sustainable development: from a policy innovation perspective. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach, where data is taken from various secondary sources, such as official reports, scientific journals, and local statistical data. The results indicate that Banyuwangi District has successfully reduced poverty levels and improved the quality of life for its residents through eco-tourism programs, the digitalization of public services (Smart Kampung), the empowerment of SMEs, and the provision of free education and healthcare services. Additionally, participatory budgeting programs have strengthened local government accountability. The discussion in this study focuses on how innovations in policies that focus on economic, social, and political aspects can create significant impacts that can be applied in other regions. These findings show that Banyuwangi is an example of a successful region in achieving sustainable development by utilizing policy innovations based on public value

Keywords: digital Transformation; Sustainable Development; Policy Innovation

1. Pendahuluan

Transformasi pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang diusung dalam berbagai forum internasional, yang dimuat dalam agenda 2030 dan Perjanjian Iklim Paris yang menggaris bawahi bahwa

perlunya transformasi sosial untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan target iklim global (Giachi & Alvarez-Tinoco, 2022; O'Flynn, 2007; Winkelmann dkk, 2020). Perubahan transformatif dianggap memerlukan

kan reorganisasi mendasar dan menyeluruh di berbagai sektor. Untuk itu, kebutuhan akan inovasi di tingkat pemerintah daerah muncul melalui upaya dalam menjembatani kesenjangan visi layanan formal dan informal, baik menggunakan solusi yang bersifat sementara maupun jangka panjang (Giachi & Alvarez-Tinoco, (2022). Di sisi lain, pentingnya menggunakan pendekatan inovatif adalah guna untuk menjawab tantangan global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Azoulay & Jones, 2020; Ghosh & Kamath, 2012; Mazzucato et al., 2020; Omelyanenko et al., 2020).

Oleh karena itu, karena pemerintah adalah merupakan bagian penting dari masyarakat yang bertanggung jawab untuk memajukan pembangunan sosial melalui kebijakan-kebijakan inovatifnya, karena bagaimanapun keberhasilan dan kegagalan suatu negara dapat dikaitkan dengan kualitas tata kelola yang dijalankan oleh pemerintahnya (Howlett & Rayner, 2007; Reddy, 2016; Wang et al., 2022), serta kolaborasi yang dibangun dari berbagai pihak, karena Kerjasama yang baik antar berbagai pemangku kepentingan diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan Kurniasih dkk., (2017). Dalam konteks ini, Kabupaten Banyuwangi muncul sebagai salah satu model keberhasilan transformasi lokal menuju pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada inovasi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebelumnya Banyuwangi dikenal sebagai daerah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, infrastruktur yang terbatas, dan tingkat investasi yang rendah. Didalam penyampaian yang diungkapkan oleh Yandra, Utami and Husna, (2020) bahwasannya kondisi itu tercermin dari data kemiskinan yang menunjukkan jumlah penduduk miskin yang signifikan serta persentase penduduk miskin yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya; meskipun begitu, tren tersebut

menunjukkan adanya peluang transformasi jika program-program peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta insentif investasi difokuskan pada daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, perubahan nyata akan terlihat melalui sinergi antara perbaikan jaringan transportasi, perluasan konektivitas digital, serta dukungan kebijakan yang mendorong UMKM lokal dan proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan daya saing wilayah dan mengahpaus jumlah kemiskinan yang ada di kabupaten Banyuwangi. Berikut data penduduk miskin di kabupaten Banyuwangi.

Tabel 1. Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi (Ribu Jiwa) Tahun 2010-2023

Tahun	Jumlah	Persentase
2010	175.10	11,25%
2011	164.00	10,74%
2012	157.20	9,97%
2013	152.20	9,61%
2014	147.70	9,34%
2015	146.00	9,17%
2016	140.45	8,79%
2017	138.54	8,64%
2018	125.50	7,80%
2019	121.37	7,52%
2020	130.37	8,06%
2021	130.93	8,07%
2022	122.01	7,51%
2023	119.52	7,34%

Sumber: <https://banyuwangikab.bps.go.id/>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Banyuwangi di tahun 2010 berjumlah sekitar 175.10 ribu jiwa, dan mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 3,91% menjadi 119.52 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2023). Sebagai kabupaten dengan potensi geografis, budaya, dan sumber daya alam yang melimpah, serta berkat visinya yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, Banyuwangi mampu mentransfo

masikan dirinya dari wilayah agraris tradisional menjadi salah satu pusat inovasi daerah yang diakui secara nasional maupun internasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan inovatif pemerintah daerah yang diimplementasikan secara konsisten sejak awal 2010-an, seperti program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan serta Kesehatan.

Dalam bentuk lain, contoh nyata transformasi daerah Banyuwangi menuju pembangunan berkelanjutan juga bisa dilihat dari pengembangan sektor pariwisata dengan mengusung konsep *eco-tourism*, yakni bentuk pariwisata yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengalaman wisata yang berkelanjutan. Konsep yang dijalankan tersebut pada akhirnya mampu mengantarkannya memperoleh penghargaan Internasional dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations World Tourism Organization /UNWTO*) *Awards for Excellence and Innovation in Tourism* untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola (BeritaBwi, 2024b).

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi Banyuwangi menuju pembangunan berkelanjutan dari perspektif Inovasi Kebijakan, yang akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan strategis dapat diadopsi oleh daerahnya untuk itu transformasi Banyuwangi tidak dapat dilepaskan dari konsep *Public Value* atau nilai publik. Diperkenalkan oleh (Moore, 1995). Teori ini menekankan pentingnya pemerintah dalam menciptakan nilai bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan inovatif, dengan memperhatikan kepentingan publik secara luas Crosby dkk, (2017); Williams & Shearer, 2011). Dalam konteks Banyuwangi, penerapan nilai publik ini tampak nyata dalam berbagai sektor, seperti

pengelolaan pariwisata, digitalisasi layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan ini, Banyuwangi telah berhasil menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang positif bagi keberlanjutan daerahnya.

2. Perspektif Teoritis Inovasi Kebijakan

Dalam konteks administrasi publik inovasi kebijakan merupakan ide baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan efektivitas program, dan menjaga kepercayaan masyarakat Borrás & Edquist, (2013). Secara konseptual, inovasi kebijakan publik didefinisikan sebagai pendekatan kebijakan yang berorientasi pada misi tertentu Ohoiwutun & Zacharias, (2024). Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi tantangan sosial dengan menerapkan metode, strategi, atau kebijakan baru yang berbeda dari praktik yang sudah ada guna menyelesaikan masalah publik secara lebih efektif Sousa dkk, (2019). Sedangkan menurut Giachi (2022) inovasi kebijakan publik merupakan pengembangan kebijakan yang berfokus pada penerapan ide-ide baru, teknologi, dan pendekatan sistemik (Giachi & Alvarez-Tinoco, 2022). Sehingga inovasi kebijakan publik menjadi sangat penting karena lingkungan yang berubah dengan cepat memerlukan respons kebijakan yang lebih fleksibel, adaptif, dan proaktif Torfing & Ansell, 2017a; Xuan dkk, (2022). kebijakan inovasi yang sukses membutuhkan tata kelola kolaboratif, koordinasi yang kuat antaraktor, serta fleksibilitas dalam merespons perubahan cepat di lingkungan global Laasonen dkk, (2022).

Inovasi dalam kebijakan publik memainkan peran kunci dalam menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat Hildén dkk, (2014). Inovasi juga dapat

mendorong kreativitas dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang maksimal, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal Pearce, (2003). Maka dari itu sebagaimana yang disampaikan oleh Niara dkk, (2019) penting bagi pemangku kebijakan untuk terus mempertimbangkan dan menerapkan pendekatan inovatif dalam merancang kebijakan publik, karena kebijakan-kebijakan konvensional yang ada selama ini cenderung tidak cukup responsif dalam menghadapi kondisi krisis dengan skala sebesar Torfing & Ansell, (2017). Pentingnya inovasi kebijakan tidak hanya terletak pada menciptakan solusi teknis, tetapi juga kemampuan untuk membangun ketahanan jangka panjang dalam menghadapi ketidakpastian global di masa depan Pangaribuan & Munandar, (2021). Menurut Jordan (2014) inovasi kebijakan dapat diinterpretasikan dari beberapa perspektif yang berbeda Jordan & Huitema, (2014). Ada tiga persepektif dalam Inovasi kebijakan yakni, Pertama, sumber elemen baru (penemuan). Perspektif ini menyoroti bagaimana aktor (pembuat kebijakan, ilmuwan, atau praktisi) menghasilkan solusi baru melalui penelitian, eksperimen, atau adaptasi dari konteks lain. Kedua, difusi, maksudnya adalah bagaimana kebijakan baru diterima dan diadaptasi dalam berbagai konteks (Rogers, 2003; Volden, 2006), seperti jejaring, komunikasi, dan tekanan eksternal yang memengaruhi keberhasilan difusi. Ketiga dampak akhir dari kebijakan, mencakup pengukuran sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Public Value

Nilai public (*Public value/PV*), merujuk pada hasil kebijakan yang tidak saja memberikan manfaat langsung kepada individu tapi juga memperkuat kesejahteraan kolektif, legitimasi pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan Rhodes &

Wanna, (2007), Van Gestel dkk, (2023). Dalam hal ini, konsep *Public Value* menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis keberhasilan Banyuwangi dalam menciptakan nilai bagi masyarakatnya. Teori ini menekankan bahwa pemerintah harus berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk nilai ekonomi, sosial, maupun politik dan lingkungan (Moore, 2014; Smith, 2004; Wang, 2016; Wang et al., 2022; Wang & Christensen, 2017). Moore berpendapat bahwa pemerintah bukan hanya penyedia layanan atau pembuat peraturan, tetapi juga dapat menghasilkan *Public Value* (PV) (Gestel & Grotenbreg, 2020; Moore, 1995, 2014; Parker dkk, 2023), karena daya saing suatu negara didasarkan pada kapasitas dan kemampuan pemerintahnya untuk menciptakan nilai-nilai publik tersebut (Alford, 2008; Alford & O'Flynn, 2009; Crosby dkk, 2017; Davis & West, 2009; O'Flynn, 2007; Stoker, 2006).

Menurut Talbot, teori nilai publik dipandang sebagai sesuatu yang besar (Talbot, 2009), sebuah perubahan paradigmatik O'Flynn, (2007) dan melampaui administrasi publik tradisional dan manajemen publik baru Bryson dkk, (2014). Oleh karena itu, Model PV lebih dari sekadar *The Public Administration* dengan menekankan keterlibatan langsung warga negara dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan (van Gestel et al., 2023; Williams & Shearer, 2011). Model ini melangkah lebih jauh dari NPM (yang menekankan efisiensi, produktivitas dan nilai uang) dengan menekankan pada pembangunan kepercayaan yang lebih luas terhadap pemerintah, memastikan legitimasi dan memperkuat dialog demokratis berama melalui inovasi yang bernilai sosial (Hansen & Jacobsen, 2016; Mason & Araujo, 2021; Osborne, 2010). Dalam konteks Banyuwangi, penerapan teori ini dapat dilihat dari (Bozeman &

Johnson, 2014; Faulkner & Kaufman, 2018; Jørgensen & Bozeman, 2007; Moore, 1995):

1. Nilai Ekonomi, Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan jaminan sosial.
2. Nilai Sosial, Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesetaraan, keadilan, dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, dan kesehatan.
3. Nilai Politik, Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.

Penerapan konsep *Public Value* di Banyuwangi tidak hanya memberikan dampak positif secara lokal tetapi juga menjadi model yang dapat di replikasi oleh daerah lain di Indonesia. Di dalam pernyataan Junaidi, Yandra and Hamuddin, (2018) Transformasi ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui inovasi kebijakan yang berbasis nilai publik, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif.

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan inovatif di Kabupaten Banyuwangi mendorong transformasi menuju pembangunan berkelanjutan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya bersumber dari artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, buku, website pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS), setelah data didapatkan dilakukan analisis untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan kebijakan unggulan yang telah diimplementasikan, seperti pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, digitalisasi layanan publik, dan program pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini juga mempertimbangkan

indikator ekonomi, sosial, dan politik untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan metode studi pustaka ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam mengadopsi kebijakan serupa untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan inklusif.

4. Hasil dan Diskusi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengembangkan berbagai program berbasis nilai publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini mencakup tiga dimensi utama: nilai ekonomi, sosial, dan politik. Berikut penjelasan lengkap dengan program-program yang relevan:

1. Nilai Ekonomi

a. Pariwisata Berbasis Komunitas

Salah satu perubahan kebijakan yang paling terlihat di Banyuwangi adalah transformasi dalam sektor pariwisata. Daya tarik alamnya seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, dan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi menetapkan dirinya sebagai tujuan wisata unggulan di Indonesia. Pemerintah daerah tidak hanya mendorong pariwisata sebagai sumber ekonomi utama, tapi juga menggabungkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaannya. Sebagai contoh, Kawah Ijen dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pemandu wisata sekaligus pelestari lingkungan. Selain itu juga mengadakan acara-acara budaya seperti Banyuwangi *Ethno Carnival* dan Festival Gandrung Sewu tidak hanya menanamkan daya tarik wisata, tetapi juga berperan dalam pelestarian tradisi lokal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa industri pariwisata di Banyuwangi dapat memberikan kontribusi Pendapatan per kapita sebesar Rp. 33,6 juta perkapita pertahun ditahun 2014 yang sebelumnya pada tahun 2010 hanya berjumlah Rp20,8 juta (BeritaBwi, 2016),

artinya dengan terjadinya peningkatan pendapatan perkapita di Banyuwangi menunjukkan tingginya daya minat turist untuk berwisata ke Banyuwangi yang menyajikan keindahan alam dan penampilan kebudayaan bagi para pengunjung.

Inisiatif Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisata ini telah mendapatkan pengakuan-pengakuan di tingkat internasional dimana pemerintah kabupaten Banyuwangi mendapatkan berbagai penghargaan diantaranya Pada tahun 2016 dari *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dimana penghargaan yang didapatkan dengan kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola kreatif dan pada tahun 2018 Banyuwangi kembali mendapatkan penghargaan yaitu dari ASEAN *Tourism Standard Award* sebagai kota wisata yang bersih dan selanjutnya pada tahun 2021 Banyuwangi kembali mendapatkan penghargaan dari *Trisakti Tourism Award* untuk kategori ekowisata, dengan didapatkannya penghargaan tersebut semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang menerapkan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat masyarakat lokal selaku komunitas yang ada di Banyuwangi (BeritaBwi, 2024b). Keberhasilan Banyuwangi dalam memajukan pariwisata berbasis komunitas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat local dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah.

b. Program UMKM

Dalam bidang UMKM Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengimplementasikan berbagai program dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program ini dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Salah satu inisiatif utama adalah melalui program

“Warung Naik Kelas”, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk UMKM lokal, khususnya warung tradisional. Dulakukan memberikan pelatihan diantaranya adalah terkait manajemen usaha, pelatihan tentang desain kemasan, dan pelatihan teknologi digital, hal ini dilakukan oleh pemerintah Banyuwangi adalah untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing produk mereka ke pasar yang lebih luas. Selaian hal tersebut Banyuwangi juga meluncurkan program “Smart Kampung,” yang mengintegrasikan layanan public berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan UMKM di desa-desa. Melalui program ini, desa-desa di Banyuwangi dilengkapi dengan infrastruktur teknologi digital yang memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produk mereka secara online. Sebagai hasilnya, UMKM lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

c. Pengentasan Kemiskinan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ada program sosial yang dilakukan yaitu melalui program “Rantang Kasih” dimana dalam Program ini pemerintah kabupaten Banyuwangi menyediakan makanan bergizi bagi lansia miskin yang tinggal sendiri, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Hingga tahun 2023, lebih dari 10.000 lansia telah menerima manfaat dari program ini, dengan adanya program ini secara langsung juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal yaitu sebagai penyedia makanan tersebut. Selain itu adalah program “Jalin Matra” (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) difokuskan untuk membantu keluarga miskin ekstrem dengan memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan. Bukti keberhasilan program ini terlihat dari data BPS Banyuwangi yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 8,06% pada tahun 2020 menjadi 7,34% pada tahun 2023.

Pemerintah Banyuwangi juga aktif dalam kolaborasi lintas sector untuk memperkuat dampak program pengentasan kemiskinan. Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Di antaranya pendapatan perkapita yang terus meningkat, pada 2022 sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp. 58,08 juta pada 2023. PDRB daerah juga naik dari Rp. 93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp. 101,29 triliun (2023). Kesuksesan ini juga mendapatkan pengakuan nasional dan internasional. Pada tahun 2021, Banyuwangi menerima penghargaan Innovative Government Award dari Kementerian Dalam Negeri RI atas berbagai program inovatifnya di bidang pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (BeritaBwi, 2024).

2. Nilai Sosial

a. Bantuan Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah meluncurkan program Pendidikan dan kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Di bidang pendidikan, adanya program “Banyuwangi Cerdas” yang menawarkan bantuan biaya sekolah bagi murid dari keluarga kurang mampu, dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Selanjutnya, pemerintah Banyuwangi juga meluncurkan program penyediaan seragam dan alat tulis gratis bagi siswa sekolah dasar. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga serta meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Program pendidikan gratis ini didukung oleh anggaran daerah yang dialokasikan khusus melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Akibatnya, angka putus sekolah di Banyuwangi hanya 2,08 persen dan masuk lima yang terendah di Jawa Timur Husdinariyanto, (2024). Di bidang kesehatan, Banyuwangi

melaksanakan program “Lahir Procot Pulang Bawa Akta”, yang memastikan akses layanan persalinan gratis di fasilitas Kesehatan pemerintah. Program ini tidak hanya menyediakan layanan persalinan, tetapi juga menjamin bayi yang lahir mendapatkan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu identitas anak secara otomatis (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, 2020).

Keberhasilan program pendidikan dan kesehatan gratis di Banyuwangi juga diakui di tingkat nasional. Pada tahun 2022, Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas upayanya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, program “Banyuwangi Cerdas” mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sebagai salah satu inovasi terbaik di sektor pendidikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat, program pendidikan dan kesehatan tanpa biaya di Banyuwangi telah memberikan dampak positif dalam mengurangi kesenjangan sosial (BeritaBwi, 2024) dan meski terdapat tantangan kedepannya adalah apabila terjadinya kepemimpinan daerah baru yang cenderung adalah membuat program baru yang fokus tujuannya adalah untuk kemajuan, namun dikhawatirkan adalah merubah atau mengganti program ini.

b. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan dedikasinya terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui berbagai kebijakan serta program yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Salah satu inisiatif utama di bidang ini adalah “Desa Ramah Perempuan dan Anak”, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam

rangka mendukung inklusi sosial, Banyuwangi menjalankan program “Peduli Difabel”, yang menawarkan pelatihan keterampilan, akses pendidikan, dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah mendirikan pusat pelatihan khusus yang menyediakan keterampilan seperti menjahit, teknologi informasi, dan kewirausahaan Irham, (2020).

Berbagai program yang dibuat telah mendapatkan pengakuan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2022, Banyuwangi menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta penghargaan *Inclusive Policy Award* dari organisasi internasional atas inovasi dalam mendukung hak penyandang disabilitas BeritaBwi, (2018). Banyuwangi telah menunjukkan bahwa pendekatan inklusif terhadap gender dan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah daerahnya berhasil merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok yang rentan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dukungan dari kebijakan yang tepat, dan alokasi anggaran yang strategis merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial di Banyuwangi.

3. Nilai Politik

a. Smart Kampung

Program *Smart Kampung* yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah inovasi yang berlandaskan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa yang berkelanjutan. Banyuwangi sendiri telah mengembangkan skema *Smart Kampung* sejak 2016 untuk mendorong budaya digital hingga tingkat desa. Selain untuk pelayanan

publik terkait kependudukan, juga digunakan untuk permasalahan bantuan sosial, pendidikan, hingga Kesehatan. Dengan pengembangan desa secara berkelanjutan, sebanyak 51 desa masuk kategori “maju” dan 138 desa kategori “mandiri”. Bahkan desa di Banyuwangi peringkat 1 desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi (BeritaBwi, 2023).

Aspek lain dari *Smart Kampung* adalah pemanfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan dan kesehatan. Program ini memberikan desa-desa di Banyuwangi fasilitas seperti pembelajaran *online*, perpustakaan digital, dan konsultasi kesehatan jarak jauh. Selama masa pandemi *COVID-19*, fasilitas-fasilitas ini sangat membantu warga desa agar tetap bisa mengakses pendidikan dan layanan kesehatan tanpa harus meninggalkan desa. Keberhasilan *Smart Kampung* juga didukung oleh prinsip kolaborasi. Pemerintah Banyuwangi bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan telekomunikasi, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat infrastruktur dan memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Keberhasilan program *Smart Kampung* diakui secara nasional maupun internasional. Pada tahun 2019, Banyuwangi mendapatkan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) (BeritaBwi, 2016b). Dengan adanya *Smart Kampung*, Banyuwangi berhasil tidak hanya dalam meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga terhubung dengan pasar nasional dan global melalui transformasi digital dan pengembangan kapasitas. Hal ini menunjukkan bahwa Banyuwangi telah berhasil menerapkan paradigma pembangunan partisipatif yang seimbang (Mohan & Stokke, 2000). Program ini merupakan bukti nyata bahwa teknologi dapat dimanfaatkan dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan antara wilayah

perkotaan dan pedesaan. Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci sukses program ini.

b. Anggaran Partisipatif

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan sistem anggaran partisipatif sebagai pendekatan baru yang inovatif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui program ini, warga dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga alokasi anggaran daerah dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan terutama melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang didukung dengan teknologi informasi.

Salah satu contoh nyata dari pelaksanaan anggaran partisipatif adalah alokasi dana untuk program Smart Kampung, di mana masyarakat terlibat langsung dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang berbasis teknologi. Selain itu, besaran dana untuk desa juga ditentukan berdasarkan masukan dari warga mengenai proyek yang sesuai dengan kebutuhan spesifik desa, seperti pembangunan jalan, sistem irigasi, atau fasilitas publik lainnya. Keberhasilan ini mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Pada tahun 2021, Banyuwangi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu daerah dengan inovasi terbaik dalam pengelolaan anggaran daerah. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (BeritaBwi, 2023). Anggaran partisipatif di Banyuwangi mence

masyarakat. Dengan melibatkan warga di setiap tahapan pengelolaan anggaran, Banyuwangi berhasil tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini menjadi dasar yang krusial bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kabupaten tersebut.

5. Kesimpulan

Transformasi Banyuwangi menuju pembangunan berkelanjutan adalah hasil dari penerapan kebijakan inovatif yang didasarkan pada nilai public (Public Value). Banyuwangi telah melakukan perubahan yang baik dalam berbagai sector adalah dengan mengintegrasikan dimensi nilai ekonomi, sosial, dan politik yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan keberlanjutan lingkungan, dengan hal ini pemerintah kabupaten Banyuwangi dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan seperti kemiskinan, akses layanan dasar, dan disparitas wilayah dengan berbagai program unggulan yang telah diterapkan. Hal ini terlihat dari Peningkatan pendapatan per kapita dan turunya angka kemiskinan di Banyuwangi hal ini tentunya menunjukkan sebuah keberhasilan pemerintah dalam menjalankan komitmen global dalam pembangunan berkelanjutan. Tanpa disadari Program *Smart Kampung* ternyata telah mempercepat transformasi digital di pedesaan dimana pelaku usaha bisa memasarkan produknya dalam platform digital dalam menggapai pasar yang lebih luas adalah dengan menggabungkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Pariwisata berbasis komunitas juga telah meningkatkan ekonomi sambil mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Berbagai penghargaan diterima, baik di tingkat nasional maupun di kancah internasional, seperti yang diberikan oleh

UNWTO. Penghargaan ini menunjukkan bahwa daerah ini berhasil mengadopsi konsep pembangunan yang kreatif dan berkelanjutan. Kesuksesan ini memberikan contoh yang baik bagi daerah lain untuk mengadopsi kebijakan serupa. Dari penelitian ini bisa menjadi dasar penelitian kedepan adalah untuk membahas model inovasi kebijakan dalam transformasi pembangunan yang berkelanjutan.

6. Pengakuan

Terima kasih kepada Ibu Denok Kurniasih, M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik. Prof Dr. Paulus Israwan Setyoko, M.S. dan Prof Dr Dwiyanto India Hono selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Kebijakan.

7. Daftar Pustaka

- Alford, J. (2008). The limits to traditional public administration, or rescuing public value from misrepresentation. *Australian Journal of Public Administration*, 67(3), 357–366. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8500.2008.00593.X>
- Alford, J., & O’Flynn, J. (2009). Making sense of public value: Concept, critiques, and emergent meanings. *Intl Journal of Public Administration*, 32(3– 4), 171– 191. <http://doi.org/10.1080/01900690902732731>
- Azoulay, P., & Jones, B. (2020). Beat COVID-19 through innovation. *Science* (New York, N.Y.), 368(6491), 553. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.ABC5792>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2023). Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzgjMg==/persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-banyuwangi.html>
- BeritaBwi. (2016a, January 21). Banyuwangi Raih Penghargaan Pariwisata dari Badan PBB | Berita Banyuwangi. BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita-daerah/banyuwangi-raih-penghargaan-pariwisata-dari-badan-pbb.html>
- BeritaBwi. (2016b, April 3). Banyuwangi Peroleh Penghargaan Top 99 Inovasi Layanan Publik | Berita Banyuwangi. BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-peroleh-penghargaan-top-99-inovasi-layanan-publik>
- BeritaBwi. (2018, July 26). Banyuwangi Raih Penghargaan Kota Layak Anak. <https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-raih-penghargaan-kota-layak-anak>
- BeritaBwi. (2023, January 5). Canangkan SPBE Desa, Banyuwangi Perkuat Transformasi Digital Smart Kampung | Berita Banyuwangi. BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita/canangkan-spbe-desa-banyuwangi-perkuat-transformasi-digital-smart-kampung>
- BeritaBwi. (2024a, July 31). Sejak Pertama Kali Diluncurkan, 3.647 Mahasiswa Dapat Beasiswa Banyuwangi Cerdas Berita Banyuwangi. BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita/sejak-pertama-kali-diluncurkan-3647-mahasiswa-dapat-beasiswa-banyuwangi-cerdas>
- BeritaBwi. (2024b, December 5). Tujuh Kali Berturut, Banyuwangi Ditetapkan Sebagai Kabupaten Terinovatif | Berita Banyuwangi. BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita/tujuh-kali-berturut-banyuwangi-ditetapkan-sebagai-kabupaten-terinovatif>
- BeritaBwi. (2024c, December 21). Banyuwangi Raih APBD Award dari Kemendagri . BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita/banyuwangi-raih-apbd-award-dari-kemendagri>
- Borrás, S., & Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. *Technological Forecasting and Social Change*, 80(8), 1513– 1522. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2013.03.002>

- Bozeman, B., & Johnson, J. (2014). The political economy of public values: A case for the public sphere and progressive opportunity. [Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0275074014532826](http://Dx.Doi.Org/10.1177/0275074014532826), 45(1), 61– 85. <https://doi.org/10.1177/0275074014532826>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/PUAR.12238>
- Crosby, B. C., ‘t Hart, P., & Torfing, J. (2017). Public value creation through collaborative innovation. *Public Management Review*, 19(5), 655– 669. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1192165>
- Davis, P., & West, K. (2009). What do public values mean for Public action?: Putting public values in their plural place. *American Review of Public Administration*, 39(6), 602– 618. <https://doi.org/10.1177/0275074008328499>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. (2020). Prosedur baku pelaksanaan kegiatan standar operasional prosedur: Bayi Lahir Prokot Pulang Bawa Akta Kelahiran (three in one) Daring Rumah Sakit dan Puskesmas. <https://spm.banyuwangikab.go.id/uploads/berkas/sop/sop-pelayanan-bayi-lahir-procot-pulang-bawa-akta.pdf>
- Faulkner, N., & Kaufman, S. (2018). Avoiding theoretical stagnation: A systematic review and framework for measuring public value. *Australian Journal of Public Administration*, 77(1), 69– 86. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12251>
- Gestel, N. van, & Grotenbreg, S. (2020). Creating a Public Value Strategy – The Netherlands Enterprise Agency. <https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/creating-a-public-value-strategy-the-netherlands-enterprise-agenc>
- Ghosh, A., & Kamath, L. (2012). Decentralisation and local government innovation in providing urban services for the poor in South and South-east Asia. *Space and Polity*, 16(1), 49– 71. <https://doi.org/10.1080/13562576.2012.698134>
- Giachi, S., & Alvarez-Tinoco, R. (2022). Innovation policy development for sustainable fisheries in the Global South: from R&D to system transformation. *Innovation and Development*, 12(1), 113– 134. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2020.1831169>
- Hansen, J. R., & Jacobsen, C. B. (2016). Changing strategy processes and strategy content in public sector organizations? A longitudinal case study of NPM reforms’ influence on strategic management. *British Journal of Management*, 27(2), 373–389. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12157>
- Hildén, M., Jordan, A., & Rayner, T. (2014). Climate policy innovation: developing an evaluation perspective. *Environmental Politics*, 23(5), 884– 905. <https://doi.org/10.1080/09644016.2014.924205>
- Howlett, M., & Rayner, J. (2007). Design principles for policy mixes: Cohesion and coherence in “New Governance Arrangements.” *Policy and Society*, 26(4), 1–18. [https://doi.org/10.1016/S1449-4035\(07\)70118-2](https://doi.org/10.1016/S1449-4035(07)70118-2)
- Husdinariyanto, N. (2024, May 6). Anak Tidak Sekolah di Banyuwangi Salah Satu yang Terendah di Jatim. *Antara News*. <https://www.antaranews.com/berita/4091046/anak-tidak-sekolah-di-banyuwangi-salah-satu-yang-terendah-di-jatim>
- Irham. (2020, August 30). Semangat Penyandang Disabilitas Banyuwangi, Belajar Meracik Kopi di Musim Pandemi Covid- 19. *Fakta News*. <https://faktanews.co.id/semangat-penyandang-disabilitas-banyuwangi-belajar-meracik-kopi-di-musim-pandemi-covid-19/>

- Jordan, A., & Huitema, D. (2014). Innovations in climate policy: conclusions and new directions. *Environmental Politics*, 23(5), 906–925. <https://doi.org/10.1080/09644016.2014.924209>
- Jørgensen, T. B., & Bozeman, B. (2007). Public values: An inventory. *Administration and Society*, 39(3), 354–381. <https://doi.org/10.1177/0095399707300703>
- Kurniasih, Denok, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron. 2017. Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora Vol 19 No. 1*, 1- 7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Laasonen, V., Kolehmainen, J., & Sotarauta, M. (2022). The complexity of contemporary innovation policy and its governance in Finland. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 35(4), 547–568. <https://doi.org/10.1080/13511610.2020.1842176>
- Mason, K., & Araujo, L. (2021). Implementing marketization in public healthcare system: Performing reform in the English national service. *British Journal of Management*, 32(2), 473–493. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12417>
- Mazzucato, M., Kattel, R., & Ryan-Collins, J. (2020). Challenge-driven innovation policy: Towards a new policy toolkit. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20(2), 421–437. <https://doi.org/10.1007/S10842-019-00329-W>
- Mohan, G., & Stokke, K. (2000). Participatory development and empowerment: The dangers of localism. *Third World Quarterly*, 21(2), 247–268. <https://doi.org/10.1080/01436590050004346>
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press. https://books.google.com/books/about/Creating_Public_Value.html?hl=id&id=Hm9uKVj0qDYC
- Moore, M. H. (2014). Public value accounting: Establishing the philosophical basis. *Public Administration Review*, 74(4), 465–477. <https://doi.org/10.1111/puar.12198>
- O’Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. *Australian Journal of Public Administration*, 66(3), 353–366. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8500.2007.00545.X>
- Ohoiwutun, S. K., & Zacharias, T. (2024). Public administration policy innovation towards the realization of good public policy governance. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(6), 1285–1293. <https://doi.org/10.59888/AJOSH.V2I6.268>
- Omelyanenko, V., Kudrina, O., Semenikhina, O., Zihunov, V., Danilova, O., & Liskovetska, T. (2020). Conceptual aspects of modern innovation policy. *European Journal of Sustainable Development*, 9(2), 238–238. <https://doi.org/10.14207/EJSD.2020.V9N2P238>
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance* (Issue 1993). Routledge. <https://www.routledge.com/The-New-Public-Governance-Emerging-Perspectives-on-the-Theory-and-Practice-of-Public-Governance/Osborne/p/book/9780415494632>
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan pemerintah DKI Jakarta menangani pandemic COVID- 19. *Parallax*, 14(1), 9–19. <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>
- Parker, S., Hartley, J., Beashel, J., & Vo, Q. (2023). Leading for public value in multi-agency collaboration. *Public Policy and*

- Administration, 38(1), 83– 106. <https://doi.org/10.1177/0952076721999490>
- Pearce, L. (2003). Disaster management and community planning, and public participation: How to achieve sustainable hazard mitigation. *Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards*, 28(2), 211– 228. <https://doi.org/10.1023/A:1022917721797>
- Reddy, P. (2016). Localising the sustainable development goals (SDGs): The role of local government in context. *African Journal of Public Affairs*, 9(2). [https://www.semanticscholar.org/paper/Localising-the-sustainable-development-goals-\(SDGs\)-Reddy/b2a2f3c17d86c38958362d6a6459eb9af4ebce24](https://www.semanticscholar.org/paper/Localising-the-sustainable-development-goals-(SDGs)-Reddy/b2a2f3c17d86c38958362d6a6459eb9af4ebce24)
- Rhodes, R. A. W., & Wanna, J. (2007). The limits to public value, or rescuing responsible government from the platonic guardians. *Australian Journal of Public Administration*, 66(4), 406– 421. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8500.2007.00553.X>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*, 5th Edition. Free Press. https://books.google.co.id/books?id=9U1K5LjUOwEC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Smith, R. F. I. (2004). Focusing on public value: Something new and something old. *Australian Journal of Public Administration*, 63(4), 68– 79. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8500.2004.00403.X>
- Sousa, M., Ferreira, C., Vaz, D., & Strategy, O. for. (2019). Innovation public policy - The case of Portugal. *Management and Economics Research Journal*, 5. <https://doi.org/10.18639/MERJ.2020.962097>
- Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? <http://Dx.Doi.Org/10.1177/0275074005282583>, 36(1), 41– 57. <https://doi.org/10.1177/0275074005282583>
- Talbot, C. R. (2009). Public value - The next “big thing” in public management? *International Journal of Public Administration*, 32(3– 4), 167– 170. <https://doi.org/10.1080/01900690902772059>
- Torring, J., & Ansell, C. (2017a). Strengthening political leadership and policy innovation through the expansion of collaborative forms of governance. *Public Management Review*, 19(1), 37– 54. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1200662>
- Torring, J., & Ansell, C. (2017b). Strengthening political leadership and policy innovation through the expansion of collaborative forms of governance. *Public Management Review* (Print), 19(1), 37– 54. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1200662>
- van Gestel, N., Ferlie, E., & Grotenbreg, S. (2023). A public value strategy for sustainable development goals: Transforming an existing organization? *British Journal of Management*, 35(2), 839–853. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12742>
- Volden, C. (2006). States as policy laboratories: Emulating success in the Children’s Health Insurance Program. *American Journal of Political Science*, 50(2), 294– 312. <https://doi.org/10.1111/J.1540-5907.2006.00185.X>
- Wang, B. (2016). Public value in moral market: A case study of human organ transplantation system. *International Journal of Public Administration*, 39(2), 135– 145. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.1003304>
- Wang, B., & Christensen, T. (2017). The open public virtue account and comprehensive social development: An assessment of China and the United States. *Administration & Society*, 49(6), 852– 881. <https://doi.org/10.1177/0095399715587522>
- Wang, B., Xia, L., & Wu, A. M. (2022). Social development with public value: An

- international comparison. Springer, 162, 909–934. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02805-5>
- Williams, I., & Shearer, H. (2011). Appraising public value: Past, present, and futures. *Public Administration*, 89(4), 1367–1384. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9299.2011.01942.X>
- Winkelmann, R., Donges, J. F., Smith, E. K., Milkoreit, M., Eder, C., Heitzig, J., Katsanidou, A., Wiedermann, M., Wunderling, N., & Lenton, T. M. (2020). Social tipping processes for sustainability: An analytical framework. *Ecological Economics*, 192. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107242>
- Xuan, Y., Balkin, R., Han, J., Edu, J., Hu, R., Cenicerros, H. D., Bruna, J., Hesthaven, J. S., & Zdeborova, L. (2022). Optimal policies for a pandemic: A stochastic game approach and a deep learning algorithm. *Proceedings of Machine Learning Research*, 145, 987–1012. <https://proceedings.mlr.press/v145/xuan22a.html>
- Junaidi, J., Yandra, A. and Hamuddin, B. (2018) ‘Riots in Indonesian Main Island: Peace Action of Defend Islam Impact on Economic Environment in Local Media Discourse’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 156(1). Available at: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/156/1/012059>.
- Niara, J. *et al.* (2019) ‘Yandra 2134-Article Text-4180-1-10-20181209’, 11(2), pp. 142–149.
- Yandra, A., Utami, B.C. and Husna, K. (2020) ‘Distortion of Government Policy Orientation in Public-Private Partnership (PPP)’, *Policy & Governance Review*, 4(1), p. 40. Available at: <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i1.172>.